2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154
Website : http://dkp.sumutprov.go.id/
Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut
Telp : 061-4568819/4153335

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Diharapkan Perubahan Renja ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini berisikan gambaran tentang program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan untuk anggaran APBD murni sampai triwulan ke-2 tahun 2024 dan yang akan direncanakan untuk perubahan rencana kerja, hasil-hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, perubahan target indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 serta dana indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan guna meningkatkan kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Disadari bahwa Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Perubahan Renja Tahun 2024 ini untuk selanjutnya dapat diperbaiki.

Akhirnya, saya ingin mengajak semua pihak, marilah kita saling bahu membahu dengan semangat kemitraan, kita selenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, September 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197708262003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 4
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II dan Capaian Indikator Kinerja 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 39
2.3 Isu-iisu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II 40
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 45

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA ……46

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja ……..…….. 46
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....…….. 47

BAB IV PENUTUP 49

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkah Daerah (P-Renja OPD) adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Renja OPD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan yang sedang berjalan, sub kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Derah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan perubahan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (P-RKPD).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di tahun berjalan, maka terdapat beberapa hal yang memerlukan perubahan diantaranya :

1. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan,

perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil kegiatan

2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Renja Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023. Perubahan Renja 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan RPD Tahun 2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan,

keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN). Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Upaya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan perundang-undangan yang kondusif pendampingan. Selanjutnya, pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (walfare) hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas unggulan yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang mengurusi bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk Perubahan Renja tahun 2024 melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

I.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.
12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 42 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut :

a. Penyesuaian targetkinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;

c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan Perubahan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan arah pembangunan dan rencana kerja yang mengalami perubahan tahun 2024. Perubahan

Renja 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaian sampai triwulan ke-2 tahun 2024, serta dalam rangka mengarahkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana masing-masing Bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah *Pendahuluan* yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja OPD.

Bab II adalah *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, juga* yang menguraikan secara statistik perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan yang menunjukkan posisi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tahun 2023 dengan realisasi pencapaian target Perubahan Renstra OPD tahun 2024-2026 dan analisis kinerja pelayanan OPD.

Bab III adalah *Rencana Kerja dan Pendanaan*, pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

Bab IV adalah *Penutup* yang berisi harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dan peningkatan pelayanan OPD di masa datang.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.

Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II telah dilakukan secara efektif dan efesien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan evaluasi terhadap Renja sampai dengan Triwulan II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja yang dilakukan per-triwulan setiap tahunnya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024 memuat target dan realisasi capaian rencana kerja triwulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mempermudah pemahaman akan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, maka penjelasan tentang realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi, tidak memenuhi dan melebihi target capaian indikator kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan akan diuraikan program per program serta pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dalam Tabel I.G Evaluasi Hasil Renja Sampai dengan Triwulan II dan Tabel I.H Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2024 (terlampir).

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan (%)**	**80%**	**28.136.258.125**	**65%**	**14.922.001.218**	**65%**	**14.922.001.218**	**65%**	**53,03%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	1.042.414.940	1 Kegiatan	254.047.430	1 Kegiatan	254.047.430	75%	24,37%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	258.251.000	2 Dokumen	149.011.810	2 Dokumen	149.011.810	100%	57,70%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	784.163.940	2 Laporan	105.035.620	2 Laporan	105.035.620	50%	13,39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	18.934.208.634	1 Kegiatan	10.924.460.492	1 Kegiatan	10.924.460.492	100%	57,70%
	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	128 Orang/Bulan		128	10.667.860.492	128	10.667.860.492	100%	58,03%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		18.384.894.866	Orang/Bulan		Orang/Bulan			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	549.313.768	1 Dokumen	256.600.000	1 Dokumen	256.600.000	100%	46,71%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	155.764.000	1 Kegiatan	57.034.000	1 Kegiatan	57.034.000	100%	36,62%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1 Laporan	102.580.000	1 Laporan	36.232.000	1 Laporan	36.232.000	100%	35,32%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	53.184.000	1 Laporan	20.802.000	1 Laporan	20.802.000	100%	39,11%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	97.729.000	1 Kegiatan	17.325.000	1 Kegiatan	17.325.000	27%	17,73%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1 Unit	62.713.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang	35.016.000	8 Orang	17.325.000	8 Orang	17.325.000	53%	49,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	1 Kegiatan	707.850.185	1 Kegiatan	301.559.948	1 Kegiatan	301.559.948	67%	42,60%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Perangkat Daerah (Kegiatan)								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	25.450.000	6 Paket	12.725.000	6 Paket	12.725.000	50%	50,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	97.173.383	6 Paket	0	6 Paket	0	25%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	139.530.000	9 Paket	109.024.100	9 Paket	109.024.100	75%	78,14%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	60.580.000	6 Laporan	14.400.000	6 Laporan	14.400.000	50%	23,77%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	1 Laporan	277.046.000	1 laporan	114.764.601	1 laporan	114.764.601	100%	41,42%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	108.070.802	1 Dokumen	50.646.247	1 Dokumen	50.646.247	100%	46,86%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	844.209.658	1 Kegiatan	310.500.000	1 Kegiatan	310.500.000	17%	36,78%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4 Unit	35.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0%	0,00%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10 Unit	559.209.658	5 unit	310.500.000	5 unit	310.500.000	50%	55,52%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	250.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan	5.883.626.050	1 Kegiatan	2.808.625.072	1 Kegiatan	2.808.625.072	63%	47,74%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	49.369.850	1 Laporan	16.310.000	1 Laporan	16.310.000	100%	33,04%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.181.868.000	6 Laporan	443.869.895	6 Laporan	443.869.895	50%	37,56%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	20.546.200	6 Laporan	0	6 Laporan	0	50%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	4.631.842.000	6 Laporan	2.348.445.177	6 Laporan	2.348.445.177	50%	50,70%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang	1 Kegiatan	470.455.658	1 Kegiatan	248.449.276	1 Kegiatan	248.449.276	73%	52,81%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10 Unit	270.123.458	5 Unit	103.654.276	5 Unit	103.654.276	50%	38,37%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	10 Unit	60.000.000	8 Unit	44.960.000	8 Unit	44.960.000	80%	74,93%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	92.332.200	3 Unit	51.850.000	3 Unit	51.850.000	60%	56,16%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1 Unit	48.000.000	1 Unit	47.985.000	1 Unit	47.985.000	100%	99,97%
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)**	**25%**	**592.127.400**	**5%**	**69.811.056**	**5%**	**69.811.056**	**47%**	**11,79%**
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	538.528.400	-	51.358.056	-	51.358.056	33%	9,54%
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final	1 Dokumen	74.884.000	1 Dokumen	51.358.056	1 Dokumen	51.358.056	100%	68,58%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		RZWP-3-K (Dokumen)								
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	100 Ha	37.030.000	-	0	**-**	0	0%	0,00%
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	100 Ha	426.614.400	-	0	**-**	0	0%	0,00%
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya Bentuk Perizinan Pengelolaan Ruang Laut 0 sampai 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)	10 Dokumen	53.599.000	3 Rekomendasi	18.453.000	3 Rekomendasi	18.453.000	60%	34,43%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	10 Rekomendasi	53.599.000	6 Rekomendasi	18.453.000	6 Rekomendasi	18.453.000	60%	34,43%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Meningkatnya Produksl Perikanan Tangkap (Persen atau ton)**	**2,53% 456.086,29**	**10.731.715.347**	**231.985,00**	**5.276.831.029**	**231.985,00**	**5.276.831.029**	**51%**	**49,17%**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya Bantuan Alat Penangkapan Ikan yang diserahkan kepada Masyarakat (unit) Tersedianya Bantuan GPS yang diserahkan kepada Masyarakat	327 Unit 8 Unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 Orang 80 Modul	2.712.609.046	327 Unit 8 Unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 Orang 80 Modul	1.581.224.347	327 Unit 8 Unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 Orang 80 Modul	1.581.224.347	53%	58,29%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		(Unit) Tersedianya Bantuan Mesin Genset yang diserahkan kepada Masyarakat (unit) Tersedianya Bantuan Mesin Kapal yang diserahkan kepada Masyarakat (unit) Tersedianya Bantuan Sampan Bermotor beserta kelengkapannya yang diserahkan kepada Masyarakat (unit) Tersedianya jaminan Asuransi Nelayan (orang) Tersedianya Rumah Ikan di Perairan (Modul)								
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	-	647.379.046	-	216.868.947	-	216.868.947	35%	33,50%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	-	2.065.230.000	-	1.364.355.400	-	1.364.355.400	70%	66,06%
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kelembagaan Bagi Masyarakat di Perairan Umum (Kegiatan) Terlaksananya	5 Kegiatan 2631500 Ekor 550 Pcs 10 Unit	6.747.709.000	5 Kegiatan 2631500 Ekor 550 Pcs 10 Unit	3.255.868.600	5 Kegiatan 2631500 Ekor 550 Pcs 10 Unit	3.255.868.600	40%	48,25%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penebaran Benih Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya (ekor) Tersedianya Bantuan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (pcs) Tersedianya Bantuan Sampan Solu di Perairan Umum Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (unit)								
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	-	6.747.709.000	-	3.255.868.600	-	3.255.868.600	50%	48,25%
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Sosialisasi Penangkapan Ikan Terukur (Lokasi)	3 Lokasi	82.547.000	1 Lokasi	35.393.530	1 Lokasi	35.393.530	10%	42,88%
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	-	82.547.000	-	35.393.530	-	35.393.530	55%	42,88%
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya kegiatan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi (kegiatan)	1 Kegiatan	1.188.850.301	1 Kegiatan	404.344.552	1 Kegiatan	404.344.552	100%	34,01%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	1 unit	816.023.043	1 unit	305.413.412	1 unit	305.413.412	100%	37,43%
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)	1 Layanan	372.827.258	1 Layanan	98.931.140	1 Layanan	98.931.140	100%	26,54%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Tercapainya Rekomedasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan Ikan (persen) Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya (persen) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2 % 101 Persen 226.542,25**	**6.994.208.411**	**56.418,96**	**2.301.647.744**	**56.418,96**	**2.301.647.744**	**51%**	**32,91%**
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan penetapan persyaratan dan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan (kegiatan)	1 Kegiatan	105.155.000	1 Kegiatan	55.798.000	1 Kegiatan	55.798.000	66%	53,06%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	30 Rekomendasi	58.150.000	20 Rekomendasi	28.647.000	20 Rekomendasi	28.647.000	66%	49,26%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	30 Rekomendasi	47.005.000	20 Rekomendasi	27.151.000	20 Rekomendasi	27.151.000	66%	57,76%
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya penataan keramba jaring apung di Danau Toba (kegiatan) Produksi Benih Udang Galah (ekor) Produksi Ikan kakap (kg) Produksi Udang Vaname (kg) Produksi Udang Windu (kg) Terlaksananya Belanja Operasional dan Sarana UPTD. Budidaya Ikan Air Payau dan Laut (tahun) Tersedianya Prasarana Perbenihan di UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut (kegiatan)	1 Kegiatan 100.000 ekor 1000 kg 5.000 kg 2000 Kg 1 Tahun 2 kegiatan	5.518.528.411	1 Kegiatan 100.000 ekor 1000 kg 5.000 kg 2000 Kg 1 Tahun 2 kegiatan	1.873.084.594	1 Kegiatan 100.000 ekor 1000 kg 5.000 kg 2000 Kg 1 Tahun 2 kegiatan	1.873.084.594	78%	33,94%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	1 Uniit	2.100.972.250	1 Uniit	546.078.000	1 Uniit	546.078.000	100%	25,99%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	1 Unit	832.236.161	1 Unit	397.920.944	1 Unit	397.920.944	100%	47,81%
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)	1 Dokumen	233.074.000	1 Dokumen	6.696.000	1 Dokumen	6.696.000	100%	2,87%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya (orang)	60 Orang	62.425.000	25 Orang	6.840.000	25 Orang	6.840.000	42%	10,96%
	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (orang)	150 Orang	2.289.821.000	75 Orang	915.549.650	75 Orang	915.549.650	50%	39,98%
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi Benih Sebar (ekor) Produksi Calon Induk (ekor) Produksi Nila Salin Adaptif (ekor) Restocking Benih Ikan di Perairan Umum (ekor) Tersedianya Induk dan Calon Induk Unggul (paket) Tersedianya Sumber Air (paket)	1.500.000 ekor 1.000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 Paket 1 Paket	1.370.525.000	1.500.000 ekor 1.000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 Paket 1 Paket	372.765.150	1.500.000 ekor 1.000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 Paket 1 Paket	372.765.150	10%	27,20%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau	1 Unit	1.370.525.000	1 Unit	372.765.150	1 Unit	372.765.150	30%	27,20%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)								
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan (%)**	**50%**	**875.091.009**	**25%**	**430.108.500**	**25%**	**430.108.500**	**80%**	**49,15%**
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (kegiatan)	1 Kegiatan	677.544.732	1 Kegiatan	310.839.500	1 Kegiatan	310.839.500	100%	45,88%
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1 Dokumen	62.008.000	1 Dokumen	6.680.000	1 Dokumen	6.680.000	100%	10,77%
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1 Dokumen	509.117.732	1 Dokumen	248.722.500	1 Dokumen	248.722.500	100%	48,85%
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (kelompok)	41 Kelompok	106.419.000	41 Kelompok	55.437.000	41 Kelompok	55.437.000	100%	52,09%
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	1 Kegiatan 50 Persen	197.546.277	1 Kegiatan	119.269.000	1 Kegiatan	119.269.000	60%	60,38%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (kegiatan) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Perikanan (persen)								
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1 Dokumen	147.467.597	1 Dokumen	111.747.000	1 Dokumen	111.747.000	100%	75,78%
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	-	50.078.680	-	7.522.000	-	7.522.000	20%	15,02%
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Meningkatnya rekomendasi izin usaha unit pengolah ikan (Lokasi) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)**	**7 Kabupaten 49,74 Kg/Kapita/Tahun**	**1.257.358.417**	**51,24 Kg/Kap/Tahun**	**348.604.562**	**51,24 Kg/Kap/Tahun**	**348.604.562**	**55%**	**27,73%**

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Kegiatan)	1 Kegiatan	47.006.000	1 Kegiatan	14.301.000	1 Kegiatan	14.301.000	40%	30,42%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi (rekomendasi)	50 Rekomendasi	47.006.000	30 Rekomendasi	14.301.000	30 Rekomendasi	14.301.000	40%	30,42%
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (waktu)	1 Tahun	874.390.735	3 Bulan	327.555.562	3 Bulan	327.555.562	56%	37,46%
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	6 Unit Usaha	510.575.377	4 Unit Usaha	184.017.562	4 Unit Usaha	184.017.562	66%	36,04%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)								
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	363.815.358	18 Unit Usaha	143.538.000	18 Unit Usaha	143.538.000	45%	39,45%
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pemberian fasilitasi bagi masyarakat pengolahan ikan (kegiatan) Terlaksananya pemetaan dan pemantauan bahan baku industri pengolahan ikan lintas kabupaten (kegiatan)	1 kegiatan	335.961.682	1 kegiatan	6.748.000	1 kegiatan	6.748.000	70%	2,01%
	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	1 Dokumen	267.027.682	1 Dokumen	6.748.000	1 Dokumen	6.748.000	100%	2,53%

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Daerah Provinsi Tahun 2024		REALISASI KINERJA PADA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	TW II		K	Rp	K	Rp
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha)	5 Unit Usaha	68.934.000	2 Unit Usaha	0	2 Unit Usaha	0	40%	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja									**58,17%**	**48,06%**
Total				**48.586.758.709**		**23.349.004.109**				

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan Indikator Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dengan target Kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp. 28.136.258.125,- pada program ini terdapat 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi Rp. 149.011.810,- dari anggaran 258.251.000,- . Sampai dengan Triwulan II rata-tara capaian kinerja 100% dengan serapan capaian anggaran sebesar 57,70%.
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi Rp. 105.035.620,- dari anggaran Rp. 784.163.940,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 13,39 %
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi Rp. 10.667.860.492,- dari anggaran Rp. 18.384.894.866,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100% dengan serapan capaian anggaran sebesar 58,03 %
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi Rp. 256.600.000,- dari anggaran Rp. 549.313.768,- Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 46,71 %
3) Administrasi Barang Milik Daerah.
   a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dengan realisasi Rp. 36.232.000 dari anggaran Rp. 102.580.000 Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 35,32 %.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan realisasi Rp. 20.802.000 Dari anggaran sebesar Rp. 53.184.000 Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 35,32 %.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan realisasi Rp. 17.325.000,- dari anggaran sebesar Rp. 102.580.000,-. sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100% dengan serapan capaian anggaran sebesar 49,48%.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan realisasi Rp. 0,- dari anggaran sebesar Rp. 62.713,-. sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 0% dengan serapan capaian anggaran sebesar 0%.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi Rp. 12.725.000,- dari anggaran sebesar Rp. 25.450.000,-, sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 50 %.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 97.173.383,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 0 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 25 %.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi Rp. 109.024.100,-, dari anggaran Rp. 139.530.000,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 75% dengan serapan capaian anggaran sebesar 78,14 %.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan realisasi Rp. 14.400.000,-, dari anggaran Rp. 60.580.000,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 50% dengan serapan capaian anggaran sebesar 23,77 %.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi Rp. 114.764.601,- dari anggaran Rp 277.046.000,-. Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 41,42 %.

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, realisasi Rp 50.646.247,- dari anggaran Rp 108.070.802,- Sampai dengan Triwulan II rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 46,86 %.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi Rp.0,- dari anggaran Rp 35.000.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 0% dengan serapan dana sebesar 0%.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi Rp. 310.500.000,- dari anggaran Rp 559.209.658,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 55,52 %.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan realisasi Rp 0,- dari anggaran Rp 250.000.000,-.Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 0% dengan serapan capaian anggaran sebesar 0 %

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi Rp 16.310.000,- dari anggaran Rp 49.369.850,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan capaian anggaran sebesar 33,04 %

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi Rp 443.869.895,- dari anggaran Rp 1.181.868.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50% dengan serapan dana sebesar 37,56 %.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan realisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 20.546.200,- sampai dengan Triwulan II, rata rata capaian kinerja 0% dengan serapan capaian anggaran sebesar 0%

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi Rp 2.348.445.177,- dari anggaran Rp 4.631.842.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan capaian anggaran 50,70 %.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi Rp 103.654.276,- dari anggaran Rp 270.123.458,-.Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan capaian anggaran 38.37 %

b. Pemeliharaan Mebel, dengan realisasi Rp. 44.960.000,-, dari anggaran Rp 60.000.000,-.Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 80 % dengan serapan capaian anggaran 74, 93 %

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi Rp 51.850.000,- dari anggaran Rp 92.332.200,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 60 % dengan serapan dana sebesar 56,16 %.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan realisasi sebesar Rp. 47.985.000,- dari anggaran Rp 48.000.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 99,97 %.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebesar 65% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.922.001.218,- atau sebesar 53,03% dengan capaian tinggi, selanjutnya untuk pencapaian lebih tinggi masih terkendala dengan masih banyak sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

B. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan realisasi sebesar Rp. 51.358.056,- dari anggaran Rp 74.884.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 68,58 %.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dari anggaran Rp 37.030.000,.

Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 0 % dengan serapan dana sebesar 0 %.

3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dari anggaran Rp 426.614.400,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 0 % dengan serapan dana sebesar 0 %.
4) Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan realisasi sebesar Rp. 18.453.000,- dari anggaran Rp 53.599.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 60 % dengan serapan dana sebesar 34,43 %.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 47% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 69.811.056,- atau sebesar 11,79% dengan capaian masih rendah, rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyak sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan realisasi sebesar Rp. 216.868.947,- dari anggaran Rp 647.379.046,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 35 % dengan serapan dana sebesar 33,50 %.
2) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan realisasi sebesar Rp. 1.364.355.400,- dari anggaran Rp 2.065.230.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 70 % dengan serapan dana sebesar 66,06 %.
3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan realisasi sebesar Rp. 3.255.868.600,- dari anggaran Rp 6.747.709.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan dana sebesar 48,25 %.
4) Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan

realisasi sebesar Rp. 35.393.530,- dari anggaran Rp 82.547.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 55 % dengan serapan dana sebesar 42,88 %.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp. 305.413.412,- dari anggaran Rp 816.023.043,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 37,43 %.
6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp. 98.931.140,- dari anggaran Rp 372.827.258,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 26,54 %.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 51% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.276.831.029,- atau sebesar 49,17% dengan capaian sedang, rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyak sub kegiatanyang masih dalam tahap pelaksanaan.

D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

1) Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dengan realisasi sebesar Rp. 28.647.000,- dari anggaran Rp 58.150.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 66 % dengan serapan dana sebesar 49,26%.
2) Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, dengan realisasi sebesar Rp. 27.151.000,- dari anggaran Rp 47.005.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 66 % dengan serapan dana sebesar 57,76%.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan realisasi sebesar Rp. 546.078.000,- dari anggaran Rp 2.100.972.250,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 25,99%.
4) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan realisasi sebesar Rp. 397.920.944,- dari anggaran Rp 832.236.161,-.

Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 47,81%.

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar Rp. 6.696.000,- dari anggaran Rp 233.074.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 2,87%.
6) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 6.840.000,- dari anggaran Rp 62.425.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 42 % dengan serapan dana sebesar 10,96%.
7) Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 915.549.650,- dari anggaran Rp 2.289.821.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 50 % dengan serapan dana sebesar 39,98%.
8) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar Rp. 372.765.150,- dari anggaran Rp 1.370.525.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 30 % dengan serapan dana sebesar 27,20%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 51% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.276.831.029,- atau sebesar 32,91% dengan capaian kinerja realisasi anggaran rendah, rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyak sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1) Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil, dengan realisasi sebesar Rp. 6.680.000,- dari anggaran Rp 62.008.000,-.

Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 10,77%.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil, dengan realisasi sebesar Rp. 248.722.500,- dari anggaran Rp 509.117.732,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 48,85%.
3) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dengan realisasi sebesar Rp. 55.437.000,- dari anggaran Rp 106.419.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 52,09%.
4) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya, dengan realisasi sebesar Rp. 111.747.000,- dari anggaran Rp 147.467.597,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 75,78%.
5) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 7.522.000,- dari anggaran Rp 50.078.680,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 20 % dengan serapan dana sebesar 15,02%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 80% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 430.108.500,- atau sebesar 49,15% dengan capaian kinerja realisasi anggaran rendah, rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyak sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

F. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

1) Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 14.301.000,- dari

anggaran Rp 47.006.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 40 % dengan serapan dana sebesar 30,42%.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan realisasi sebesar Rp. 184.017.562,- dari anggaran Rp 510.575.377,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 66 % dengan serapan dana sebesar 36,04%.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing, dengan realisasi sebesar Rp. 143.538.000,- dari anggaran Rp 363.815.358,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 45 % dengan serapan dana sebesar 39,45%.
4) Sub Kegiatan Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 6.748.000,- dari anggaran Rp 267.027.682,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan serapan dana sebesar 2,53%.
5) Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dari anggaran Rp 68.934.000,-. Sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja 40 % dengan serapan dana sebesar 0%.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 55% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 348.604.562,- atau sebesar 27,73% dengan capaian kinerja realisasi anggaran rendah, rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyak sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Rencana Strategis 2024 – 2026. Seiring dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara, maka

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap Program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

Dari gambaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa :

a. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi target realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan dan sub kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan. Dan akumulatif realisasi dihitung pada akhir Triwulan IV.

b. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi Target realisasi Program/kegiatan, namun terdapat 1 sub kegiatan yang setiap Triwulan telah memenuhi target kinerja yaitu sub kegiatan ”Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”.

c. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Belum ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan pada pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

d. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.**

   Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II yaitu :

   - **Faktor Pendorong**

   ➢ Adanya Perencanaan yang matang dalam penyusunan Perubahan Renja.

- Mekanisme kinerja yang berorientasi kepada pencapaian Kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan ASN Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien

- **Faktor Penghambat**
  - Belum memadainya jumlah SDM aparatur Perencana;
  - Belum memadainya jumlah SDM Aparatur peneliti;
  - Beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional kegiatan dan rencana anggaran kas per sub kegiatan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran sasaran, dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

2.2.1 Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

2.2.2. Cara Pengukuran Kinerja (isi hasil realisasi 2023)

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya, maka arah pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 mengacu kepada pelaksanaan tahun keempat Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2024-2026. Rencana pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 – 2026 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014– 2026 antara lain adalah :
   A. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
      1. Keterbatasan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
      2. Batas wilayah perairan antara Indonesia dengan Negara tetangga belum tuntas diselesaikan;
      3. Masih tingginya jumlah masyarakat pesisir yang tergolong kedalam masyarakat miskin;

4. Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil belum optimal;
5. Belum adanya Regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Terjadinya kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove di kawasan budidaya perikanan;
7. Masih terjadinya pencurian ikan oleh kapal asing;

B. Penangkapan Ikan

1. Kapal ikan menangkap ikan tanpa dokumen yang sah, seperti;
   a. Tanpa IUP/SIPI, atau telah habis masa berlakunya;
   b. Surat ijin tidak sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya, seperti: penangkapan ikan dengan alat terlarang dan Pelanggaran jalur penangkapan ikan;
   c. Terjadinya pencemaran di perairan umum dan pantai;
   d. Terjadi kesenjangan pemanfaatan SDI di perairan Sumatera Utara antara pantai barat dan pantai timur;
   e. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dan oli;
   f. Jumlah kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
   g. Produksi perikanan masih didominasi oleh hasil tangkapan di laut;
   h. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terbatas;
   i. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
   j. Rendahnya mutu hasil tangkapan ikan nelayan yang berakibat kepada rendahnya harga jual ikan;

C. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

1. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memperhatikan standar kesehatan;
2. Akses permodalan bagi usahabidang kelautan dan perikanan masih terbatas;
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil

perikanan masih rendah;

4. Belum semua parameter uji untuk pengujian produk hasil perikanan terakreditasi;
5. Jenis peralatan uji di PMHP belum lengkap;
6. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Sumatera Utara;
7. Ketersediaan bahan baku untuk UPI yang melakukan kegiatan ekspor hasil perikanan masih terbatas;
8. Belum semua UPI dan supplier memiliki Seritifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
9. Mutu hasil perikanan yang di ekspor oleh UPI belum sesuai dengan permintaan pembeli luar negeri;
10. Pengelolaan usaha penangkapan ikan oleh sebagian besar pelaku usaha belum dilandasi dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik;

D. Budidaya Perikanan.

1. Meningkatnya harga pakan sehingga meningkatkan biaya produksi;
2. Belum tuntasnya penanganan penyakit ikan, khususnya pada pembudidayaan udang;
3. Belum optimalnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
4. Terbatasnya akses permodalan;
5. Penyakit ikan dan udang.

Dampak terhadap pencapaian program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera U*t*ara adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan khususnya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pedagang hasil perikanan di Sumatera Utara;
b. Meningkatnya ekspor hasil perikanan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan devisa;
c. Meningkatnya konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Utara;

d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Peluang dan tantangan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain :

a. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

d. Pengembangan pesisir dan pulau-pulau terluar.
   - Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan serta pembudidaya ikan tradisional di kawasan pesisir;
   - Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan;
   - Memelihara kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya;

e. Pengembangan usaha hasil perikanan.
   - Mengembangkan usaha hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat nelayan khususnya di pedesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
   - Diversifikasi hasil olahan perikanan.
   - Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
   - Penerapan rantai dingin.

f. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
   - Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang ,Kelautan dan Perikanan
   - Menjadikan laut sebagai perekat kesatuan dan persatuan NKRI.

g. Pengembangan budidaya perikanan
   - Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan
   - Menyediakan induk dan benih unggul

- Pencegahan hama penyakit dan ikan
- Restoking perairan umum
- Pembangunan /perbaikan dempon
- Pembangunan/perbaikan saluran irigasi

h. Pengembangan perikanan tangkap
- Meningkatkan pendapatan nelayan
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan
- Pembangunan /rehabilitasi Pelabuhan perikanan
- Pembangunan /rehabilitasi Pangkalan pendaratan Ikan
- Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapanikan lainnya
- Pemberdayaan nelayan skala kecil

i. Pengembangan perikanan, kelautan, masyarakat pesisir sebagai berikut :
- Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Meningkatkan nilai rill sumberdaya wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan.
- Meningkatkan pemantapan status kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil.
- Meningkatkan peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, laut dan perairan umum.
- Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menyelenggaran tugas pokok dan fungsi diukur berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan, secara kuantitas sampai dengan Triwulan II capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mencapai 58,17 persen kinerja realisasi keuangan sebesar 48,06%. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara kualitas kinerja masih perlu ditingkatkan. Khususnya dalam hal perumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang

menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Forum koordinasi untuk merumuskan program/kegiatan dan sub kegiatan perencanaan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga perubahan Renja tidak maksimal melaksanakan beberapa tahapan dan proses sebagaimana mestinya.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara ke depan yang dapat diidentifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan kelautan perikanan baik di Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling sejalan dan konsisten. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun berjalan 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk perencanaan yang akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan acuan dalam perubahan P.APBD TA. 2024.

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun Anggaran 2024;
2. Arahan dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
3. Menjadi tolok ukur kinerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbang yang mengacu pada isu strategis yang tertuang didalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Adapun sasaran Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi;
2. Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi;
3. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan terdistribusi sesuai kebutuhan bidang perencana.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renja tersebut tak terlepas daritujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	1. Produksi Perikanan Tangkap 2. Produksi Perikanan Budidaya 3. Tingkat Konsumsi Ikan 4. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 5. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 6. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Tabel 3.2

Rencana Perubahan Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Perubahan Renstra OPD			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2024
		2024	2025	2026	2021	2022	2023	
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	490.000	495.000	511.000	439.657,60	449.571,7	482.343,21	490.000
2.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	226.542,25	229.260,76	232.011,89	227.235,27	217.945,5	218.998	226.0542,25
3.	Tingkat Konsumsi Ikan	49,74	50,34	50,94	47,84	49,15	51,32	49,74
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,39	109,48	110,57	104,28	107	108,36	108,39
5.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100	101	102	103,7	105,2	97,30	100
6.	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	48.000	75.000	78.000	NA	NA	NA	48.000

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan Renja tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 diuraikan pada tabel *(Lampiran)*

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 untuk mendorong terwujudnya perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya, menjalin kerjasama dengan mitra kerja, kelompok nelayan, stakeholders dan lintas OPD sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara.

Program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip- prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel, dan untuk keberhasilan dari program dan kegiatan ini sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan jugaDPRD Provinsi.

Kiranya Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pembangunan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Medan, September 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197708262003121004